

VOLUME XII NOMOR 1/JUNI 2016

ISSN : 1858 - 2168



JURNAL ILMIAH
**ADMINISTRASI
PUBLIK**

PKP2A II LAN MAKASSAR

KUALITAS LAYANAN PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP KEPUASAN
PENUMPANG KRL *COMMUTER LINE AC* JURUSAN BOGOR - JAKARTA
Milawaty

OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK BIROKRASI PEMERINTAH
Dindin Supratman

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DALAM PELAKSANAAN
PILKADA DI SULAWESI SELATAN
Rasyid Thaha

CAPAIAN PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA DALAM
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Anita

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PELAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS
JARINGAN (STUDI KASUS PADA DEWAN PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR (DPKM)
Gita Susanti

SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI UNTUK MEREFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
Frida Chairunisa
Muhammad Firdaus

STRATEGI MEMENUHI LAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM-PROGRAM
INOVATIF
Grace V. Dumalang

JURNAL ILMIAH
ADMINISTRASI
PUBLIK

VOLUME XII

NOMOR 1

HALAMAN
1 - 60

MAKASSAR
JUNI 2016

ISSN
1858-2168

**EFEKTIFITAS SISTEM INFORMASI
PELAYANAN PENDIDIKAN BERBASIS JARINGAN
STUDI KASUS PADA DEWAN PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR (DPKM)**

*Information System of Education Based-Network Service
(Case Study at Education Board in Makassar)*

Gita Susanti

Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNHAS

Jl. Perintis Kemerdekaan X, Makassar

E-mail : gitasusanti65@gmail.com

Naskah diterima tanggal 26 Februari 2016. Naskah direvisi tanggal 2 April 2016. Naskah disetujui tanggal 22 Mei 2016.

Abstrak

Sistem jaringan antar organisasi merupakan pilihan strategis untuk mendapatkan sumber-sumber daya penting yang dibutuhkan, termasuk sumber daya informasi dari pemangku kepentingan. Dengan demikian pengelolaan sistem organisasi yang berbentuk sistem jaringan seperti Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) lebih efisien dalam pemanfaatan sumber-sumber daya dibandingkan kalau organisasi tersebut dikelola secara individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem informasi pelayanan pendidikan berbasis jaringan di Kota Makassar khususnya di Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus tipe eksplanatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil analisis menjelaskan bahwa sistem informasi pelayanan pendidikan berbasis jaringan pada Dewan Pendidikan Kota Makassar melalui tahapan input, pemrosesan data, dan informasi outputs belum efektif dalam menentukan strategi pelayanan pendidikan. Informasi yang dihasilkan masih bersifat parsial, dimana data dan informasi tidak banyak digunakan dalam perumusan kebijakan karena lebih banyak berpihak pada kekuasaan. Selain itu, faktor lain penyebab belum efektifnya informasi yang ada di Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) adalah peralatan untuk mengolah informasi dan sumber daya operator yang menginput data dan diproses menjadi informasi belum maksimal.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Jaringan Antar Organisasi, DPKM

Abstract

Network system in organizations is a strategic choice to obtain essential resources needed, including information resources from stakeholders. Thus the system management of organization in the form of network system such as Makassar City Board of Education (DPKM) is more efficient in the utilization of resources than if the organization is managed by individual party. This study aimed to analyze the information system of network-based educational services in Makassar city, especially in Makassar City Board of Education. Method used in this study is a qualitative approach with the explanative type of case study research strategy. This study uses in-depth interviews and documentation techniques. Analysis of data was through data reduction, data presentation, conclusions and verification. The results of the analysis explain that the information system of network-based educational services in Makassar City Board of Education through the stages of input, data processing, and information output was not effective in determining the educational service strategy. Information generated was still partial, where data and information were not widely used in the formulation of policies and it tended to be used for political purpose. In addition, other factors that led to the ineffectiveness of the existing information is the lacks of supportive equipment and human resources to manage the information and data in which this responsibility is at the heart of Makassar City Board of Education (DPKM).

Keywords: Information System, Inter-Organizational Networks, DPKM

PENDAHULUAN

Jaringan antar organisasi menjadi perhatian dari berbagai organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi non publik, karena organisasi-organisasi saat ini memiliki keterbatasan-keterbatasan sumber

daya dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemerintah daerah. Guna merespon keterbatasan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan dibutuhkan sistem jaringan antar organisasi dengan melibatkan pemerintah daerah, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) (Hill

2002, Beccera 1999, Gulati dan Gargiulo 1998 & Bardack 1994). Sistem jaringan antar organisasi merupakan pilihan strategis untuk mendapatkan sumber-sumber daya penting yang dibutuhkan, termasuk sumber daya informasi dari pemangku kepentingan yang terlibat didalamnya. Dengan demikian, pengelolaan sistem organisasi yang berbentuk sistem jaringan seperti Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) lebih efisien dalam pemanfaatan sumber-sumber daya dibandingkan kalau organisasi tersebut dikelola secara sendiri-sendiri. Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) sebagai suatu organisasi atau institusi berbentuk sistem jaringan antar organisasi yang keanggotaannya terdiri dari beberapa unsur pemangku kepentingan pendidikan yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pendidik, Pakar Pendidikan, Pengusaha, Birokrat, Pengurus Sekolah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Yayasan Sekolah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi Pendidikan. Adanya Dewan Pendidikan diharapkan dapat menentukan strategi pelayanan pendidikan di Kota Makassar.

Peran dan fungsi Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) adalah menjadi wadah aspirasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan organisasi yang berbentuk sistem jaringan, yaitu untuk mendapatkan sumber daya informasi. Dalam hal ini, Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) dapat menentukan strategi pelayanan pendidikan yang demokratis. Namun, sejak adanya Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) sampai sekarang masalah-masalah pendidikan tidak dapat teratasi terutama dapat dilihat dari hasil Ujian Akhir Nasional (UAN).

Tabel 1.
Persentase Tingkat Ketidakkulusan Ujian Nasional

No.	Kabupaten/ Kota	% Ketidakkulusan
1.	Pare-pare	39,45
2.	Barru	36,79
3.	Makassar	30,10
4.	Gowa	15
5.	Tana Toraja	0,65
6.	Luwu	0,29

Sumber : Diknas Provinsi SulSel, 2009

Adanya fenomena tersebut menunjukkan pendidikan merupakan masalah yang sangat kompleks, karena baik penentuan masalahnya maupun penentuan solusinya mengalami perdebatan para ahli dan praktisi. Masalah yang seperti itu dalam literatur administrasi publik dikenal sebagai *wicked problem* (Robert, 2000). *Wicked problem* dalam bidang pendidikan memerlukan penyelesaian secara terintegrasi, baik berbagai aspek yang melingkupinya maupun pemangku kepentingan

terlibat didalamnya. Oleh karena itu, diperlukan pihak-pihak lain diluar pemerintah untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah pendidikan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, adanya Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah pendidikan, namun kenyataannya bahwa sampai saat ini masalah pendidikan Kota Makassar belum maksimal dalam penyelesaiannya seperti hasil Ujian Akhir Nasional (UAN), kompetensi guru, komite sekolah, sarana dan prasarana serta fasilitas pembelajaran. Fenomena tersebut menunjukkan belum efektifnya Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) dalam menentukan strategi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di Kota Makassar. Untuk itu salah satu strategi yang dapat digunakan adalah penggunaan sistem informasi pelayanan pendidikan berbasis jaringan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh efektifitas sistem informasi pelayanan pendidikan berbasis jaringan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: "Apakah sistem informasi pelayanan pendidikan berbasis jaringan pada Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) sebagai salah satu alternative dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Kota Makassar telah berjalan dengan efektif?"

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk melihat proses setiap aktivitas yang terjadi dalam sistem informasi pelayanan pendidikan berbasis jaringan sehingga dapat diketahui efektifitasnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjadi bahan masukan bagi pihak pembuat kebijakan demi perbaikan sistem informasi, serta menjadi rujukan yang bermanfaat bagi pihak lain yang juga tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Jaringan antar Organisasi

Studi jaringan antar organisasi berasal dari studi yang dilakukan oleh Henry Fayol tahun 1916. Dalam tahun-tahun terakhir ini, studi ini telah banyak dikembangkan dalam literatur manajemen ilmiah (Savage, 1996). Dipandang dari latar belakang sejarah perkembangan organisasi, jaringan antar organisasi merupakan perubahan terakhir dalam agenda teori organisasi, yang memfokuskan pada peningkatan jaringan kerjasama antar organisasi (Leach, Stewart, dan Walsh, 1994).

Menurut Gulati (1998), "*interorganizational cooperation is thus a means by which an organization manage their dependence on other organization in their environment and attempt mitigate the uncertainty generated by that dependence*". Pengertian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan organisasi sebagai tempat untuk mendapatkan sumber-sumber daya semakin sulit diprediksi sehingga perlu diatur melalui jaringan kerjasama antar organisasi.

Selanjutnya, menurut Roberts (2000), "*collaboration, translated as working together is premised on the principle that by joining forces parties can accomplish more as a collective than they can achieve by acting as independent agents*". Pengertian kerjasama organisasi ini menekankan bahwa organisasi akan lebih baik jika bergabung dengan kelompok yang memiliki kekuatannya mencapai suatu tujuan dari pada melakukan secara sendiri-sendiri.

Jaringan/hubungan antar organisasi mempunyai banyak pengertian atau definisi menimbulkan ambiguitas serta implisit sehingga pengertian tersebut menjadi tidak jelas (Bardach, 1994). Menurut Bardach, jaringan kerjasama antar organisasi adalah: "*a set self-organizing working relationships among actors such that any relationship has the potential both to elicit action and to communicate efficiently*". Definisi ini bertujuan untuk menyampaikan ide bahwa kekuatan suatu jaringan terletak pada penggabungan dua kapasitas, yaitu kapasitas untuk mengorganisir hubungan-hubungan pekerjaan dan kapasitas untuk menyampaikan informasi dengan efisien.

Pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa, pertama, jaringan kerjasama antar organisasi memiliki suatu tujuan bersama yang ingin dicapai; kedua, dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan kebersamaan melalui kerjasama; ketiga, kerjasama ini dilakukan karena adanya ketidakpastian lingkungan organisasi sebagai tempat memperoleh sumber-sumber daya atau ada ketergantungan sumber daya; keempat, suatu premis yang berlaku bahwa bergabung dengan berbagai organisasi sangat efektif dalam mencapai tujuan dari pada melakukannya secara sendiri-sendiri; kelima, pada umumnya suatu organisasi melakukan kerjasama dengan organisasi lain karena melihat ada potensi yang besar dimiliki organisasi tersebut.

Dalam studinya, Hill (2002 : 6) mengemukakan beberapa karakteristik jaringan antar organisasi, yaitu:

1. *Oriented to higher purpose common vision.* Sistem jaringan antar organisasi merupakan visi yang dibangun secara bersama, bukan visi organisasi secara individu.

2. *Activity affects the whole system (assumption).* Aktivitas-aktivitas jaringan berdampak terhadap masyarakat dan juga terhadap internal organisasi.
3. *Horizontal organization.* Dalam sistem jaringan tidak berorientasi pada struktur hirarkis, melainkan setiap anggota memiliki kedudukan yang sama.
4. *Voluntary participation.* Para anggota jaringan berpartisipasi secara sukarela, terutama bagi organisasi-organisasi LSM.
5. *Decentralized.* Kekuasaan terdistribusi pada para anggota, dalam hal ini pengambilan keputusan ada pada anggota.
6. *Member-controlled.* Organisasi yang berbasis jaringan, para anggota mengendalikan semua kegiatan-kegiatan organisasi.
7. *Self-regulating.* Dalam sistem jaringan, para anggota menentukan peraturan, proses, dan prosedur jaringan.
8. *Collaborative.* Semua kegiatan direncanakan dan dilakukan dalam proses interaksi.
9. *Conitive.* Para anggota memiliki pengetahuan dan keahlian dalam bidang tugasnya, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik tanpa petunjuk dari pimpinan organisasi pembelajar.
10. *Involves a division of labour.* Semua anggota memiliki tugas tertentu dan keahlian tertentu, sehingga tugas-tugas terselesaikan dengan efisien dan efektif.
11. *Autonomous members.* Setiap anggota memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang otonom.
12. *Deleberative.* Dalam menentukan keputusan dilakukan dengan konstruktif sehingga penetapan suatu keputusan menjadi akurat.

Teori-Teori Jaringan Antar Organisasi

Beberapa teori dalam perspektif jaringan antar organisasi menjelaskan fenomena jaringan dari sudut pandang yang berbeda antara lain:

- 1) **Teori Jaringan.** Teori jaringan menjelaskan sasaran perhatian utamanya, yakni pola obyektif ikatan yang menghubungkan anggota masyarakat (individual dan kolektivitas). Salah satu ciri khas teori jaringan adalah pemusatan perhatiannya pada struktur mikro hingga makro. Artinya, bagi teori jaringan, aktor mungkin saja individu, tetapi mungkin pula kelompok, perusahaan dan masyarakat. Hubungan dapat terjadi di tingkat struktur social

skala luas maupun di tingkat yang lebih mikroskopik. Granoveter dalam Ritzer dan Goodman (2004), melukiskan hubungan di tingkat mikro itu seperti tindakan yang "melekat" dalam hubungan pribadi konkrit dan dalam dalam struktur (jaringan) hubungan itu. Hubungan ini berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor (individu atau kolektivitas) mempunyai akses berbeda terhadap sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi). Akibatnya adalah bahwa system yang terstruktur cenderung terstratifikasi, komponen tertentu tergantung pada komponen yang lain.

Teori jaringan relatif masih baru dan belum berkembang. Seperti dikatakan Burt, 1982 dalam Ritzer dan Goodman, 2004, "kini ada semacam federasi longgar dari berbagai pendekatan yang dapat digolongkan sebagai analisis jaringan". Tetapi pendekatan itu ini kian mengalami perkembangan, dibuktikan oleh sejumlah artikel dan buku yang diterbitkan berdasarkan perspektif jaringan ini dan sudah ada pula sebuah jurnal yang menerbitkan karya teoritis jaringan. Meski merupakan gabungan longgar dari berbagai pemikiran, namun teori jaringan ini bersandar pada sekumpulan prinsip yang berkaitan logis (Wellman, 1983 dalam Ritzer dan Goodman, 2004). Prinsip-prinsip tersebut adalah:

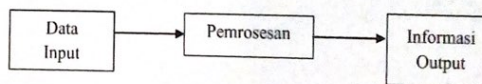
- a. Ikatan antara aktor biasanya adalah simetris baik dalam kadar maupun intensitasnya. Aktor saling memasok dengan sesuatu yang berbeda dan mereka berbuat demikian dengan intensitas yang makin besar atau makin kecil.
- b. Ikatan antara individu harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan yang lebih luas.
- c. Terstrukturnya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan non acak. Di satu pihak, jaringan adalah transitif, bila ada ikatan antara A dan B dan C, ada kemungkinan ada ikatan antara A dan C. Akibatnya adalah akan lebih besar kemungkinan adanya jaringan yang meliputi A, B dan C. Di lain pihak, ada keterbatasan tentang berapa banyak hubungan yang dapat muncul dan seberapa kuatnya hubungan itu dapat terjadi. Akibatnya adalah juga ada kemungkinan terbentuknya kelompok-kelompok jaringan dengan batas tertentu, yang saling terpisah satu sama lain.
- d. Adanya kelompok jaringan menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok jaringan maupun antara individu.

- e. Ada ikatan asimetris antara unsur-unsur di dalam sebuah system jaringan dengan akibat bahwa sumber daya yang terbatas akan terdistribusikan secara tak merata.
- f. Distribusi yang timpang dari sumber daya terbatas menimbulkan baik itu kerjasama maupun kompetisi.

- 2) Teori Ketergantungan Sumber Daya. Teori ini menjelaskan bagaimana tujuan organisasi sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada organisasi lain yang mensuplai sumber-sumber daya yang ada dilingkungannya serta berupaya untuk menemukan strategi untuk memperoleh sumber-sumber daya tersebut. Teori ini berupaya menghadapi kekuatan lingkungan dengan menggunakan strategi-strategi proaktif untuk mengakses sumber-sumber daya yang ada di lingkungannya (Becerra, 1999; Gulati dan Gargiulo 1998; Jaffe, 2001; Jones, 2004).

Konsep Sistem Informasi Pelayanan Pendidikan Berbasis Jaringan di Kota Makassar

Dalam suatu pemahaman yang sederhana sistem informasi dapat didefinisikan sebagai satu sistem yang menyediakan informasi memuat berbagai informasi penting. Informasi itu sendiri mengandung pengertian data yang telah diolah kedalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Data tidak dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan data tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat dipahami, lalu dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi mengandung tiga aktivitas dasar di dalamnya yaitu: 1) Menerima data sebagai masukan (input); 2) Memproses data; dan 3) Memperoleh informasi sebagai keluaran (output) dalam pengambilan keputusan, sebagaimana gambar di bawah ini:



Sumber : Davis (1999)

Gambar 2.
Sistem informasi

Untuk penentuan strategi pelayanan pendidikan, sistem informasi merupakan bagian yang sangat menentukan dalam mengambil keputusan yang berfungsi menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai alternatif-alternatif strategis dalam mengambil setiap keputusan yang dihasilkan. Dengan demikian, sistem informasi diharapkan dapat menghasilkan suatu strategi pelayanan pendidikan yang maksimal (baik

di Kota Makassar. Hal ini sesuai dengan pendapat Davis (1999 : 3) yang mengemukakan bahwa informasi dapat digunakan untuk mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan. Hal ini dimungkinkan karena informasi merupakan data yang sudah diolah sehingga berguna untuk membuat keputusan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus tipe eksplanatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Data Sebagai Masukan (Input)

Sistem informasi yang terdapat di Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) dimulai dari menerima data sebagai masukan atau input. Data yang diperoleh berasal dari pemangku kepentingan, namun kenyataannya data yang mereka bawa tidak maksimal. Data-data pendidikan yang diperoleh dengan mengadakan kegiatan pengambilan data di lapangan menunjukkan hasil sangat bervariasi, tergantung fenomena pendidikan yang didapatkan oleh pemangku kepentingan yang pembagiannya berdasarkan tugas yang diberikan dan disebar pada semua kecamatan di Kota Makassar. Pengumpulan data yang diamati dari fenomena-fenomena pendidikan yang terjadi pada masyarakat tergambar pada tabel 2 di bawah.

Tabel 2.
Data dari Stakeholder

NO	HASIL PEMANTAUAN	NARASUMBER
1	UAN (Ujian Akhir Nasional)	MG, MA, CE, HH, AK, YL, AT
2	Penilaian Kelulusan	MG, MA, BW, HN
3	Kepala Sekolah, Guru	SS, SN, BW, NM, BN
4	PSB (Penerimaan Siswa Baru)	SS, SB, BN,
5	Fasilitas Pembelajaran	MM, BW, MA, MG
6	Buku Pelajaran	SS, NM
7	Komite Sekolah	NM, MG, SN, BW
8	Dana BOS	MA, SB
9	Perda Pendidikan	SN, NM

(Sumber: Diolah berdasarkan wawancara dengan informan, Desember 2011)

Hasil pemantauan dari pemangku kepentingan Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) tersebut menunjukkan beberapa masalah-masalah pendidikan yang terjadi di lapangan adalah:

- 1) Tingkat kelulusan Ujian Akhir Nasional (UAN).
- 2) Metode penilaian kelulusan siswa kurang bagus.
- 3) Penerimaan guru dan pengangkatan kepala sekolah yang bersifat politis.

- 4) Perbedaan dalam penerimaan mahasiswa baru di setiap sekolah.
- 5) Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai.
- 6) Kurangnya buku pelajaran bagi siswa.
- 7) Tidak maksimalnya fungsi komite sekolah.
- 8) Dana BOS yang tidak digunakan dengan baik dan benar.
- 9) Peraturan daerah (perda) yang kurang mengakomodir kepentingan pendidikan.

Pemrosesan Data

Setelah tahap input data maka langkah selanjutnya adalah memproses data-data tersebut. Adanya informasi yang akurat untuk penentuan strategi pelayanan pendidikan yang tepat tergantung pada kualitas input data yang ada di Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM). Data mengenai hasil ujian akhir nasional (UAN), kompetensi guru, sistem penerimaan siswa baru (PSB), fasilitas pendukung, proses pembelajaran, pengawasan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS), beasiswa untuk siswa miskin, dan pemberdayaan komite sekolah merupakan input bagi Dewan Pendidikan. Namun, data tersebut masih merupakan data parsial. Data yang berasal dari unsur keterwakilan yang berada di Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) belum merupakan suatu data yang terpadu diantara keanggotaan yang ada, yang terdiri dari Unsur Birokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pendidik, pakar pendidikan, dan pengurus sekolah yang berjumlah 16 orang.

Selanjutnya, data yang parsial tersebut diproses dalam suatu sistem informasi yang dimiliki oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM). Proses tersebut tetap menghasilkan informasi tentang masalah-masalah pendidikan di Kota Makassar secara parsial pula. Berdasarkan hasil penelitian dalam memproses data tersebut, Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) memiliki peralatan komputer tapi tidak maksimal dan tidak memiliki operator yang ahli dalam bidang komputer serta yang mahir dalam mengolah data. Dengan demikian, secara teknis sistem informasi di Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) tidak berjalan dengan baik. Data-data yang sudah terkumpul dari berbagai unsur keterwakilan keanggotaan Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) serta dari hasil kegiatan pemantauan yang ditugaskan kepada anggota per-kecamatan yang berjumlah 14 kecamatan, hasil di lapangan yang ditemukan berupa kegiatan-kegiatan tersebut diproses oleh sekretaris dan wakil sekretaris

dengan memakai peralatan komputer sendiri ataukah dikerjakan oleh tim-tim kecil yang ditugaskan. Walaupun teknologi hanya merupakan pendukung serta merupakan alat untuk melahirkan informasi yang akurat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan/ strategi, alat ini tidak banyak membantu. Hal ini disebabkan sumber data yang diproses tidak memadai seperti yang terjadi di Dewan Pendidikan. Hasil wawancara dengan informan MG (Sekretaris Dewan Pendidikan mengemukakan bahwa, "Semua hasil pemantauan yang dilakukan dilaporkan secara tertulis, kemudian saya menginput data-data tersebut lalu memproses dengan komputer kemudian hasilnya dibawa dalam rapat Dewan Pendidikan Kota Makassar". (Hasil Wawancara 28 November 2011).

Ketidaktersediaan dan ketidaklengkapan informasi kemungkinan besar tidak akan melahirkan suatu strategi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah pendidikan di Kota Makassar. Sistem informasi yang diperoleh oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) menunjukkan bahwa data dari unsur keterwakilan tidak optimal, padahal informasi ini sangat penting terutama untuk penyusunan dan penentuan strategi dalam pelayanan pendidikan berbasis jaringan sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM).

Seperti yang dijelaskan di atas, pengolahan sistem informasi yang ditentukan oleh kelengkapan data dari semua unsur keterwakilan di Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) serta data-data hasil pemantauan berdasarkan adanya pembagian tugas-tugas anggota dewan pendidikan menunjukkan ketidakmaksimalan pengolahan sistem informasi. Kelengkapan data itu tidak seperti yang diharapkan. Dengan demikian perumusan atau penentuan strategi tidak optimal.

Informasi

Pemrosesan data akan menghasilkan suatu informasi. Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) mempunyai fungsi dan peran memberikan pertimbangan kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam membantu menyelesaikan masalah pendidikan. Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pendidikan Kota Makassar perlu menyediakan informasi. Namun, pendidikan dalam sistemnya tidak maksimal menyediakan informasi-informasi pendidikan secara utuh. Hal ini terlihat pada data-data pendidikan yang diproses oleh sistem informasi yang tersusun dalam bentuk berupa:

- 1) Laporan Hasil pengumpulan data ketidakkululusan siswa tahun 2008;
- 2) Profil Dewan Pendidikan;

- 3) Penyusunan dan koordinasi Kegiatan Dewan Pendidikan;
- 4) Laporan kegiatan pemantauan setiap tahun 2004-2011;
- 5) Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan akreditasi, 2011;
- 6) Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) tahun Anggaran 2010;
- 7) Program Kerja Dewan Pendidikan Kota Makassar Tahun 2008-2012;
- 8) Laporan rutin pemantauan pendidikan gratis dan dana BOS setiap bulan April – Mei;
- 9) Laporan pemantauan rutin;
- 10) Laporan kegiatan pemantauan setiap tahun terhadap UAN, UAS, dan PSB tahun 2004-2010.

Berdasarkan data yang diproses dan menghasilkan informasi pendidikan seperti yang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi hasil rekomendasi yang diberikan ke Pemerintah Daerah Kota Makassar, dalam hal ini kepada Walikota Makassar terkhusus kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar. Rekomendasi yang diberikan adalah:

- 1) Hasil Ujian Akhir Nasional di Kota Makassar
 - a. Penguasaan materi ujian yang kurang hanya dapat diatasi dengan upaya meningkatkan kompetensi guru mata pelajaran untuk memahami tujuan kelulusan mata pelajaran yang diajarkan.
 - b. Mendorong siswa agar punya motivasi belajar yang tinggi untuk dapat menguasai dan memahami karakteristik semua mata pelajaran yang dipelajarinya, serta punya percaya diri yang kuat dalam menerima dan menunjukkan transformasi pembelajaran.
 - c. Sarana-sarana dan fasilitas pendukung sebagai alat bantu dalam pencapaian kompetensi siswa perlu ditingkatkan.
- 2) Penerimaan Siswa Baru (PSB)

Setiap sekolah dalam Penerimaan Siswa Baru (PSB) harus memperhatikan grade 7,5 untuk sekolah unggulan, 7,0 bukan sekolah unggulan, dan 6,5 yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar serta tidak melampaui daya tampung yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar dengan alasan apapun. Keterbatasan daya tampung sekolah negeri diharapkan akan membuat sekolah-sekolah swasta dapat menampung siswa tersebut.

Rekomendasi yang diberikan Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) mengenai UAN, UAS, dan PSB merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun dilaksanakan. Laporan dilakukan secara tertulis ke pemerintah Kota Makassar dan Dinas Pendidikan Kota Makassar. Selain itu rekomendasi secara lisan juga dilakukan oleh Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKP) Kepada Pemerintah kota Makassar khususnya pada Dinas Pendidikan Kota Makassar pada masalah-masalah seperti:

- 1) Pengangkatan kepala sekolah yang tidak sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Penyalahgunaan dana BOS oleh Kepala Sekolah.
- 3) Kompetensi guru.
- 4) Pengangkatan guru.
- 5) Demo oleh orang tua siswa karena adanya pungutan-pungutan.

PENUTUP

Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) ternyata belum efektif dalam menentukan/ menetapkan strategi yang tepat pada pelayanan pendidikan Kota Makassar. Hal ini disebabkan karena informasi-informasi yang dihasilkan selama ini merupakan informasi yang sifatnya parsial, bukan merupakan informasi yang utuh tentang pendidikan. Informasi-informasi yang dihasilkan berupa laporan dan hasil evaluasi pendidikan masih merupakan informasi yang parsial yang ditemukan di lapangan berdasarkan kegiatan pemantauan yang ditugaskan kepada keanggotaan Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM) dan masih menggunakan sistem kerja birokrasi pemerintahan. Data dan informasi tidak banyak digunakan dalam perumusan kebijakan karena lebih berpihak pada kekuasaan. Model pengambilan keputusan masih bersifat *incremental* atau "tambal sulam" dari keputusan yang diambil sebelumnya. Belum efektifnya informasi yang ada karena peralatan untuk mengolah informasi begitu pula dengan sumber daya operator yang menginput data dan diproses menjadi informasi belum maksimal dilakukan di Dewan Pendidikan Kota Makassar (DPKM). Faktor lainnya adalah keanggotaannya mempunyai tugas utama selain tugas tambahan tersebut. Keanggotaannya pun bersifat sukarela sesuai dengan latar belakang dari unsur yang diwakilinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Davis, Gordon B. 1999. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen : Bagian I Pengantar*. PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta
- Hill, Carey. 2002. *Network Literature Review : Conceptualizing and Evaluation Networks*. (Online). (<http://www.sacyhn.media/pdf/literatureReview.pdf>)
- Jaffee, David. 2001. *Organisational Theory : Tension and Change*. McGraw-Hill Companies, Inc. New York
- Jones, Gareth R. 2004. *Organisational Theory : Design, and Change : Text and Cases. USA : Pearson Education, Inc. Upper Saddle River. New Jersey.*
- Leach, Steve, & John Stewart, Kieron Walsh. 1994. *The Changing Organization and management Of local Government*. The Macmillan Press Ltd. Great Britain.
- Ritzer, George. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Edisi VI. Kencana. Jakarta
- Roberts, Nancy. 2000. *Wicked Problems and Network Approaches to Resolution*. Dalam International Public Management Review. Vol. 1, Issue 1. – Electronic Journal. (Online), (<http://www.ipmr.net>)
- Savage, Charles M. 1996. *Fifth Generation Management*. (Red.ed.). Washington : Butterworth-Heinemann
- Dokumen dan Tulisan Ilmiah**
- Bardach, Eugene. 1994. Can Network Theory Illuminate Inter-agency Collaboration? (Onliner), (<http://www.hsg.harvard.edu/chg/dgworkshop/bardach.pdf>)
- Becerra, Raquel L. 1999. Interorganizational Service Delivery Systems: Studying a Different Kind of Arrangement. Dalam *Proceeding Twelfth Annual International conference of Public Administration Theory Network*. Florida.
- Gulati, Ranjav; Gargiulo, Martin. 1998. *Where Do Interorganizational Networks Come From?* (Online), (<http://www.ranjaygulati.com/new/research/interorg.pdf>)